
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) PENDIDIKAN

Oleh

Imron Bima Saputra¹⁾ & Mesiono²⁾¹Pascasarjana UIN Sumatera Utara²Dosen FITK UIN Sumatera UtaraEmail: ¹mesiono@uinsu.ac.id & ²imronbima0401@gmail.com**Abstrak**

Rencana Anggaran Dan Pendapatan sangat urgensi dalam dunia menejemen pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk mengkonsep RAPB agar berjalan dengan baik, pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penyusunan RAPB Pendidikan berdasarkan prinsip RAPB dan prosedur RAPB yang benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan menggunakan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan RAPB Pendidikan. Prinsip-prinsip dalam RAPB Pendidikan: (a) Terdapat pembagian kewenangan serta pertanggungjawaban yang jelas dalam system manajemen dan organisasi (b) Terdapat system akuntansi yang tepat pada pelaksanaan anggaran (c) Terdapat kajian serta analisa dalam mengevaluasi kinerja organisasi (d) Terdapat dukungan. Sedangkan prosedur RAPB Pendidikan:(a) menentukan program kegiatan yang akan didanai oleh pendanaan anggaran, (b) mnentukan sumber perolehan dana anggaran, (c) memproses sumber dana dalam bentuk finansial fisik (d) menyusun laporan anggaran sesuai dengan aturan kelembagaan, (e) membuat laporan anggaran untuk disetujui oleh pihak-pihak berwenang (f) merevisi anggaran jika ada, (g) pmenyetujui adanya revisi anggaran (h) mengesahkan anggaran.

Kata Kunci: Rencana, Anggaran, Pendapatan & Pendidikan**PENDAHULUAN**

Pendidikan dan pembiayaan ialah kedua komponen yang saling berkaitan. Masing-masing diantaranya mempunyai aspek terpenting. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan sendiri tanpa adanya pembiayaan, serta pembiayaan diperlukan sebagai pendukung dalam mengoptimalkan penggunaan seluruh aspek serta sumber daya dalam proses belajar mengajar untuk pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya, manajemen keuangan pendidikan yang benar merupakan kunci pendukung barhasilnya tujuan pendidikan itu sendiri. Terdapat tiga masalah utama dalam manajemen keuangan pendidikan, diantaranya: (a) *financing*, mengenai dari mana mendapatkan sumber pembiayaan; (b) *budgeting*, bagaimana penyaluran dana pendidikan; dan (c) *accountability*, bagaimana penggunaan dan

pertanggungjawaban anggaran yang didapatkan.[1]

Manajemen komponen keuangan perlu dikelola secara benar serta menyeluruh berdasarkan peraturan yang ditetapkan dari berbagai tahapan penyusunan, anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban, agar seluruh dana sekolah betul-betul dapat digunakan secara efektif dan efisiensi tanpa kebocoran serta terbebas adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.[2] Sesuai hal diatas bisa dipahami bahwasanya manajemen keuangan yang benar, dimulai dari merencanakan sampai evaluasi perlu direncanakan secara komprehensif.

Pasal 48 UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS mengatur bahwasanya dalam mengelola pendanaan pendidikan harus didasarkan terhadap prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya, dalam mengelola pembiayaan pendidikan harus

didasarkan pada skala prioritas, dipergunakan secara efisiensi, dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak terkait. Hal diatas diantaranya adalah penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran, dan laporannya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional RI No 162/13/2003 yang mengatur tentang prosedural penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam Pasal 9 (2) dijelaskan berbagai aspek evaluasi kepala sekolah berdasarkan tanggung jawab dan tugas klien, diantaranya sebagai administrator. Kepala sekolah merupakan administrator melalui sub kompetesinya dalam mengelola keuangan, kemudian dalam mekanisme mengelola keuangan terdapat langkah-langkah yang mana kepala sekolah wajib menyusun “Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)”.

Terkait manajemen keuangan dan pembiayaan, RAPBS merupakan persoalan utama yang sering ada di sekolah, [3] dikarenakan RAPBS ialah merupakan perencanaan tahunan, yang mana tiap-tiap sekolah harus menyusunnya setahun sekali, dan hampir setiap penyusunannya memiliki dinamika. Meski wewenang utama masih berada di tangan kepala sekolah, namun diperlukan kerjasama banyak pihak agar bisa melakukan penyusunan secara logis dan sistematis.

LANDASAN TEORI

1. *Pengertian Anggaran*

Anggaran ialah perencanaan kerja organisasi ke depan yang dituangkan didalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Anggaran pada umumnya ialah rencana kerja masa depan organisasi. Proses dalam menyiapkan anggaran diartikan penganggaran. Perencanaan kerja pada suatu organisasi dituangkan kedalam bentuk rangkaian angka sebagai tujuan yang ingin dicapai organisasi. Menulis berupa angka ialah dapat mempermudah anggota suatu organisasi untuk mengetahui apa yang ingin dicapainya dalam suatu organisasi pada kurun waktu tertentu.

Rencana kerja ialah suatu tujuan resmi organisasi yang harus dicapai oleh semua anggota organisasi.[4]

2. *Anggaran Pendidikan*

Anggaran pendidikan ialah pengalokasian anggaran terhadap fungsi pendidikan yang penganggarnya oleh kementerian/ lembaga, yang dialokasikan melalui transfer ke berbagai daerah (yakni gaji guru), tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dalam mendanai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pertanggungjawaban pemerintahan. [5]

Alokasi anggaran Pendidikan minimal dua puluh persen juga diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 49 yang didalamnya memuat tentang “pendanaan pendidikan kecuali untuk gaji gurudan dana dinas pendidikan harus dialokasikan paling sedikit 20% dari APBN terhadap sektor pendidikan dan paling sedikit 20% dari APBD”. [6]

3. *Perencanaan*

Dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, perencanaan ialah proses yang rasional dan sistematis. Perencanaan sebagai suatu proses berarti bahwa peristiwa tersebut memerlukan waktu, dan tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. [7] Perencanaan merupakan aktifitas rasional berarti harus dengan cara proses berpikir berdasarkan data nyata dan analisis logis, dan ini dapat dibuktikan masuk akal, bukan berdasarkan prediksi intuitif. Oleh karena itu, keputusan pimpinan untuk menentukan rencana harus berdasarkan fakta nyata dan data pendukung

Bisa dipahami bahwasanya dalam pengelolaan keuangan pendidikan, agar kegiatan pendidikan yang berkelanjutan dan lancar perlu adanya perencanaan yang matang, terlebih di zaman teknologi sekarang ini, yang mana pendidik tidaklah lagi satu-satunya sumber belajar siswa. Perkembangan pendidikan dewasa ini merupakan kebutuhan yang dinamis bagi seluruh peserta didik untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Akan tetapi

apabila merencanakan secara benar, maka seluruh cobaan akan terasa santai dikarenakan dipersiapkan maksimal.

4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pendidikan

Penyusunan anggaran sektor pendidikan merupakan suatu hal wajib. Prosesnya dalam hal ini tidaklah serumit anggaran organisasi besar (seperti perusahaan atau instansi pemerintahan), akan tetapi tetap berpedoman pada prinsip dan kebijakan umum yang yang ditetapkan. Istilah yang dipergunakan "Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah". RAPBS ialah perencanaan untuk memperoleh dana pendidikan dalam berbagai sumber pendapatan, juga merupakan rencana kerja tahunan yang memuat rangkaian aktifitas rutin dan berbagai aktifitas lainnya yang disertai perincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran.[8]

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang bertujuan untuk memberi penjelasan melalui metode studi pustaka (*library research*), [9] maka langkah yang ditempuh adalah dengan membaca, memahami, serta menelaah dengan baik.

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah penelaahan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Studi yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali pembahasan yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian di bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Penyusunan RAPB

Didalam menyusun anggaran RAPB, mengenai hal yang berkaitan dengan etika dan sistematika perlu untuk diperhatikan serta difungsikan. Secara teori, prinsip dan pedoman dalam menyusun RAPB dirancang untuk memenuhi etika dan sistematika itu sendiri. Dikarenakan didalam menyusun anggaran ini ialah alat perencanaan, yakni alat dalam penentuan tahapan awal didalam manajemen keuangan.

Menurut Deddy Nordiawan menyatakan salah satu fungsi anggaran adalah penganggaran merupakan alat perencanaan, melalui fungsi tersebut organisasi atau lembaga mengetahui apa yang perlu dilaksanakan serta mengarah kemana merumuskan kebijakan.[11] Perencanaan menjadi acuan bagi organisasi atau lembaga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuannya, sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai prinsip efisiensi.

Suharsaputra menuturkan, asas efisiensi berarti pengeluaran dapat dilakukan dengan biaya yang paling sedikit pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, dan asas efektivitas berarti pengeluaran dapat melakukan pengupayaan yang benar untuk pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pembiayaan yang tepat, efektif serta efisiensi. Maka bisa tercapai apabila system anggaran berdasarkan terhadap perencanaan yang matang, kemudian dilakukan perincian ke dalam rencana, dan selanjutnya mengalokasikan biaya yang dibutuhkan.

Pendanaan yang dikeluarkan akan nampak pada RAPBS, hal ini juga dijelaskan oleh pihak sekolah khususnya kepala sekolah pada saat rapat tertentu dengan wali murid. Kepala sekolah menyampaikan susunan RAPBS serta menjelaskan rincian dana dari program yang telah direncanakan sekolah. Dana-dana tersebut harus mengacu pada susunan prinsip yang mencakup: (a) Terdapat pembagian kewenangan serta pertanggungjawaban yang jelas dalam system manajemen dan organisasi (b) Terdapat system akuntansi yang tepat pada pelaksanaan

anggaran (c) Terdapat kajian serta analisa dalam mengevaluasi kinerja organisasi (d) Terdapat dukungan.[12]

Anggaran yang dibuat hendaknya sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mendorong pengendalian anggaran sebagai alat perencanaan disaat memasuki tahapan implementasi. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, sehingga prinsip-prinsip ini sangat penting. Seperti telah disinggung di atas, keempat prinsip ini harus diikuti dan menjadi asas yang dianut ketika menyusun anggaran.

Mustari mengungkapkan, ada tiga asas yang dapat dianut ketika menyusun anggaran, yakni 1). Focus anggaran yakni pada program sekolah yang benar-benar dijalankan dan bukan perkecayaan, 2). Anggaran dapat disampaikan dalam bentuk laporan yang sederhana dan sistematis untuk memudahkan orang lain memahaminya, 3). Dalam penyusunannya, maka anggaran harus melibatkan peran kepala sekolah untuk tujuan dibuatnya anggaran guna program yang direncanakan dapat dikelola dan dijalankan secara maksimal.[13] Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, anggaran sekolah dan departemen pendidikan lainnya harus diatur dengan cermat, namun perlu dibuat sederhana agar kelompok yang memiliki kepentingan (seperti orang tua siswa) bisa secara mudah memahami tujuan anggaran berdasarkan perencanaan sekolahnya.

Sementara itu, Tampubolon menjelaskan, menyusun RAPBS wajib melibatkan pihak sekolah seperti kepala sekolah, tenaga didik, staf-staf dan komite.[14] Diperluas lagi, partisipasi stakeholder dalam penyusunan RAPBS merupakan persyaratan yang penting dan lumrah. Dikarenakan dalam prinsipnya sekolah dan lembaga pendidikan lainnya tidak hanya berperan didalam proses pembelajaran, namun berperan sebagai pengawas operasional sekolah. Posisi kepala sekolah dalam menyusun RAPBS sangat penting. Namun, selain guru dan staf sekolah, partai politik lain tidak bisa dipisahkan. Sekolah, yayasan serta wali murid merupakan

pihak yang wajib ikut serta dalam menyusun RAPBS oleh kepala sekolah pada prinsipnya.

2. Prosedur Penyusunan RAPB

Tentunya saat menyusun anggaran, setiap organisasi akan mengambil langkah atau tahapan melalui langkah persiapan sampai persetujuan. Prosedural antara organisasi atau lembaga tentunya berbeda, bahkan secara signifikansi akan memiliki perbedaan. Pada instansi pendidikan yakni sekolah, penganggaran harus dengan cara proses yang panjang dikarenakan anggaran memakai dana, di antara merupakan sumbangan dari wali murid, yang membutuhkan banyak persiapan serta pertanggung jawaban.

Saat menyusun anggaran, data-data harus riil dan memenuhi kelengkapan sehingga hal itu mempermudah pihak-pihak terkait untuk penyusunan dan pengantisipasi.[15] Dalam organisasi mana pun, baik itu lembaga atau organisasi nirlaba yang bertanggung jawab atau organisasi nirlaba, anggaran adalah tahapan paling kritis dari operasi organisasi, termasuk dampak anggaran terhadap keberlanjutan rencana lama atau rencana baru. Dalam arti lain anggaran menjadi sangat kritis, dikarenakan dalam tahapan ini keperluan akan organisasi akan saling terkait, serta menentukan rencana mana yang akan dijadikan prioritas menjadi motivasi mandiri untuk tahapan ini.

Dalam hal ini yang perlu dimasukkan pada proses persiapan adalah (a) menentukan perencanaan program untuk 1 tahun anggaran dan memeriksanya (b) menetapkan sumber pendanaan dalam perencanaan program tersebut (c) menyiapkan pekerjaan sesuai informasi rinci program serta perolehan Dokumen disetujui. Dalam proses penyusunan RAPBS biasanya diawali dengan penentuan dan inventarisasi kegiatan atau prosedur yang direncanakan. Pada tahap penentuan dan inventarisasi ini perlu dilakukan pengelompokan sesuai kebutuhan rutin dan kebutuhan insidental. Hal ini sejalan dengan pandangan Anwar yang mengatakan bahwasanya mengidentifikasi aktifitas ialah

tahapan utama didalam proses menganggarkan.[16]

Pengidentifikasi dan inventaris yang berhubungan dengan kegiatan belajar dilakukan oleh masing-masing tenaga didik terkait. Dalam hal ini, wakil kepala bertindak sebagai kordinator, sedangkan kepala sekolahnya selaku legislator yang bertugas memberi kesetujuan atas wewenangnya mensahkan RAPBS. Pengidentifikasi dan inventaris merupakan usaha untuk meminimalisir adanya duplikat terkait dnegan rencana atau program-program rancangan, dan memprediksi masa depan, dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi memerlukan pendataan yang benar dan melengkapi yang disesuaikan dengan aturan guna mewujudkan tujuan tersebut.

Menentukan sumber pendanaan untuk kegiatan atau rencana yang direncanakan adalah proses selanjutnya. Dalam menyusun RAPBS, sumber pendanaan harus diperhatikan karena mempengaruhi kemampuan sekolah dalam mendanai program atau kegiatan. Sumber pendanaan untuk sekolah bisa didapatkan dari wali murid, pemerintahan pusat ataupun daerah, kalangan bisnis serta alumni. Demikian pula, mengidentifikasi sumber adalah bagian dari setiap tahap proses penganggaran.

Menurut Blocher dalam Anwar, dalam menyusun anggaran, lembaga yang kecil akan lebih mudah menyusun dan merencanakan dibandingkan dnegan institusi atau lembaga yang besar.[17] untuk tahapannya, anggaran mencakup peran komite, masa anggaran, rincian pedoman anggaran, menyusun ide-ide dan gagasan anggaran, bernegoisasi dalam anggaran, dan meninjau ulang serta merevisi anggaran yang telah dibuat apabila ada.

Dalam menyusun anggaran, tahap-tahap yang harus diperhatikan yakni:(a) menentukan program kegiatan yang akan didanai oleh pendanaan anggaran, (b) mnentukan sumber perolehan dana anggaran, (c) memproses sumber dana dalam bentuk finansial fisik (d) menyusun laporan anggaran sesuai dengan aturan kelembagaan, (e)

membuat laporan anggaran untuk disetujui oleh pihak-pihak berwenang (f) merevisi anggaran jika ada, (g) pmenyetujui adanya revisi anggaran (h) mengesahkan anggaran.

Dalam proses penyusunannya, RAPBS haruslah disusun dengan ssistematis, berikut tahapan sistmatis untuk menyusun RAPBS (A) Inventarisasi daftar mata kuliah / kegiatan sekolah tahun depan (b) Menyusun kurikulum kegiatan sesuai dengan keperluan serta prioritasnya (c) Melakukan perhitungan kuantitas, harga item barang dan keperluan modal pada tiap-tiap bagian program (d) Membuat dokumen kerja dan LKS serta melakukan penentuan pendanaan dan anggaran dikumpulkan dan ditulis sesuai dengan standarisasi RAPBS (e) untuk mengumpulkan data pendukung yang akurat sebagai pedoman untuk menjaga penganggaran yang diusulkan.[18]

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut 4 kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini, yakni:

1. Anggaran merupakan suatu perencanaan suatu program yang akan dijalankan dan diproses serta disusun desngan memerhatikan aturan yang sistematis.
2. Anggaran pendidikan merupakan pengalokasian dana basis rencana program pendidikan yang ditransfer dari daerah, mencakup gaji atau tunjangan guru. Akan tetapi tidak mencakup dana rencana program pendidikan dinas.
3. Perencanaan merupakan proses yang bertahap untuk hal penetapan tahapan-tahapan program yang akan dilakukan yang telah disepakati bersama. Perencanaan tidak bisa dilakukan sembarangan melainkan proses ini memerlukan waktu.
4. Penganggaran sektor pendidikan juga wajib. Proses ini lebih mudah dibandingkan dengan anggaran bagi instansi-instansi yang lebih besar. Akan

tetapi, untuk penyusunanya harus tetap memerhatikan standarisasi RAPBS yang berlaku. RAPBS merupakan perencanaan yang membutuhkan pengelolaan dana pendapatan untuk menjalankan program-program pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [2] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- [3] Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Dari Teori Sampai Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [4] Rudianto, *Penganggaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- [5] Toyamah, Nina dan Syaikhul Usman, *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era*
- [6] Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- [7] Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara*
- [8] Asmani, Jamal M, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- [9] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Offset Rosdakarya, 2011.
- [10] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- [11] Nordiawan, Deddy, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- [12] Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2012.
- [13] Mustari, Mohamad, *Manajemen Pendidikan Dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Arsad Press, 2013.
- [14] Tampubolon, Manahan, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- [15] Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- [16] Anwar, Idochi, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [17] Anwar, Idochi, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [18] Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.